

Judul : Tukin TNI naik, bukti negara peduli kesejahteraan prajurit
Tanggal : Jumat, 07 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tukin TNI Naik

Bukti Negara Peduli Kesejahteraan Prajurit

FOTO: NEGARA



Oleh Soleh

ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian negara terhadap kesejahteraan prajurit yang selama bertahun-tahun belum mengalami penyesuaian tunjangan.

Oleh menilai, kenaikan tukin tersebut bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Pemerintah pasti telah melakukan kajian secara matang dan komprehensif. Apalagi, sudah hampir delapan tahun tukin TNI tidak mengalami penyesuaian atau sejak tahun 2018. "Peningkatan kesejahteraan prajurit merupakan investasi penting untuk memperkuat pertahanan negara," tegas Oleh di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan penyesuaian tukin bagi prajurit TNI dan pegawai Kemhan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026. Persentase pembayaran tukin yang sebelumnya sebesar 70 persen dari nilai tunjangan nasional sesuai kelas jabatan, kini disesuaikan menjadi 90 persen.

Dalam ketentuan terbaru, tukin prajurit TNI diberikan berdasarkan kelas jabatan. Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara memperoleh tukin sebe-

sar Rp 48.613.500 per bulan. Sedangkan prajurit pada kelas jabatan terendah menerima Rp 2.553.100 per bulan.

Dengan kesejahteraan yang lebih baik, harap Oleh, prajurit semakin fokus menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. "Juga semakin profesional, disiplin, dan semakin optimal dalam menjalankan tugas negara," ucap politisi PKB ini.

Oleh menambahkan, peningkatan kesejahteraan perlu diikuti dengan peningkatan integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Ke depannya, diharapkan tidak ada lagi anggota TNI yang melakukan pelanggaran berat maupun aksi kekerasan yang dapat mencoreng nama baik institusi. "Kepercayaan masyarakat kepada TNI perlu terus dijaga melalui sikap profesional dan taat hukum," tegas mantan anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) ini.

Selain itu, ia berharap, kenaikan tukin dapat membantu prajurit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga, mereka tidak lagi terbebani persoalan ekonomi saat menjalankan tugas negara.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menambahkan, tukin bagi prajurit TNI dan pegawai Kemhan merupakan wujud nyata komitmen negara dalam memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertahanan. Langkah tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan personel, tetapi juga menjadi fondasi untuk memperkuat profesionalisme institusi pertahanan.

Juga meningkatkan kesiapan nasional dan memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan strategis pada masa mendatang.

"Penyesuaian tukin merupakan bagian dari upaya Pemerintah memberikan perhatian terhadap kesejahteraan prajurit TNI dan aparat sipil di lingkungan Kemhan," kata Dave di Jakarta, Rabu (5/8/2026). ■ TIF